

ISSN : 1412-2367

# SOSIO-RELIGIA

Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial

Vol. 8, No.2, Februari 2009

Hal-hal yang Diperbolehkan dalam Puasa:  
Suatu Analisis dengan Pendekatan Fiqh Al-Hadis

**Mukhsin Nyak Umar**

---

Keluar dari Kemelut Krisis Pendidikan Islam  
(Ke Arah Reformulasi Paradigma Filosofis)

**H. Akhyak**

---

Islam dan Demokrasi  
(Menelusuri Makna dan Respons Intelektual Muslim)

**Arsyad Sobby Kesuma**

---

Lintasan Pemikiran Ekonomi Islam

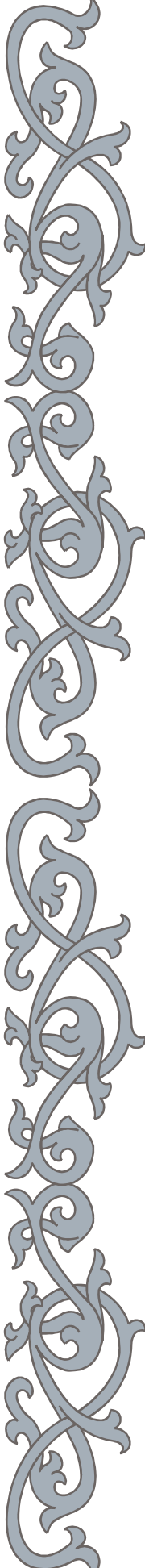
**Akhmad Mujahidin**

Lingkar Studi Ilmu Agama dan Ilmu Sosial (*LinkSAS*)  
Yogyakarta

SOSIO-RELIGIA

Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial

Vol. 8, No. 2, Februari 2009



# SOSIO-RELIGIA

*Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial*

ISSN: 1412-2367

Vol. 8, No. 2, Februari 2009

**Pemimpin Redaksi**

Udiyo Basuki

**Redaktur Pelaksana**

Sunarsih

Slamet Haryono

**Tim Redaksi**

Ahmad Bahiej

Budi Ruhiatudin

Misnen Ardiansyah

Wawan GA Wahid

Fuad Arif Fudiyartanto

Muyassarotussolichah

Ahmad Bunyan Wahib

Muhrisun

Yasin Baidi

Malik Ibrahim

**Redaktur Ahli**

Machasin

Akh. Minhaji

Syamsul Anwar

Ainurrofiq Dawam

**Alamat Redaksi**

Perum Taman Giwangan Asri I D-12

Telp. (0274) 384835 Yogyakarta

E-mail: linksas\_jogja@yahoo.com

atau journalsosioreligia@yahoo.co.id

**Diterbitkan oleh:**

Lingkar Studi Ilmu Agama dan Ilmu Sosial (*LinkSAS*)

*LinkSAS (Lingkar Studi Ilmu Agama dan Ilmu Sosial)*, merupakan sebuah forum diskusi yang membahas seputar kajian agama dan sosial (*humaniora*).

Jurnal *SOSIO-RELIGIA* telah terakreditasi dengan kategori B oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 108/DIKTI/Kep./2007 tanggal 23 Agustus 2007.

Keluar dari Kemelut Krisis Pendidikan Islam (Ke Arah Reformulasi Paradigma Filosofis) <i>H. Akhyak</i>	477 - 496
Problematika Madrasah Aliyah Diniyah di Indonesia <i>Nur Abid</i>	497 - 516
Implementasi Manajemen Mutu Terpadu dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam <i>Prim Masrokan Mutohar</i>	517 - 536
Pendekatan Proses dalam Pembelajaran Menulis <i>Nanik Sri Rahayu</i>	537 - 556
Peran Budaya dalam Disain Penelitian <i>Ibnu Qizam</i>	557 - 574
Berjalan Menuju Roma: Perlunya Ratifikasi <i>International Criminal Court</i> bagi Terjaminnya HAM di Indonesia <i>Lindra Darnela</i>	575 - 594
Indeks Jurnal	

## Problematika Madrasah Aliyah Diniyah di Indonesia

Oleh: Nur Abid\*

### Abstrak

*Madrasah Aliyah Diniyah tumbuh dan berkembang di Indonesia, seperti tumbuh dan berkembangnya masyarakat Muslim Indonesia. Ia tumbuh dan berkembang dengan karakteristiknya masing-masing, tanpa adanya buku panduan dan aturan baku dari pemerintah, sehingga berjalan dengan karakteristik dan otoritasnya masing-masing. Kondisi yang demikian ternyata terdapat adanya beberapa problem.*

*Problem Madrasah Aliyah Diniyah di Indonesia adalah: pertama, ijazahnya tidak mendapat pengakuan pemerintah, akibatnya ketika digunakan menjadi PNS atau legislatif ditolak. Solusinya perlu adanya pengakuan dari pemerintah melalui PP dan hindari diskriminasi pengakuan; kedua tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah, akibatnya belajar menggunakan fasilitas apa adanya. Solusinya penyediaan fasilitas belajar yang dibantu oleh pemerintah, seperti halnya membantu kepada SMA/MA/SMK/MAK; dan ketiga, rendahnya kompetensi dan kualitas guru, akibatnya proses belajar mengajar kurang kondusif dan kurang profesional. Solusinya diikutsertakan program S1, workshop, dan pelatihan metodologi pengajaran.*

Kata kunci : problem, aliyah, diniyah

### A. Pendahuluan

Madrasah, sebagaimana yang kita kenal dewasa ini, bukan institusi atau lembaga pendidikan Islam asli Indonesia, tetapi berasal dari dunia Islam Timur Tengah yang tumbuh dan berkembang sekitar abad ke-10 H/11 M. Madrasah muncul sebagai simbol kebangkitan golongan Sunni, dan madrasah didirikan sebagai sarana transmisi ajaran-ajaran golongan Sunni. Pada perkembangan berikutnya, madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam formal, berbeda dengan *kuttub* dan masjid. Seluruh dunia Islam telah mengadopsi sistem madrasah di samping *kuttub* dan masjid, untuk mentransfer nilai-nilai Islam. Pada awal perkembangannya, madrasah tergolong lembaga pendidikan setingkat *college* (jika dibandingkan dengan lembaga pendidikan Islam saat ini). Namun,

---

\*Alumni S3 IAIN Sunan Ampel Surabaya, Dosen dan Kepala Lembaga Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) STAIN Kediri.

selanjutnya madrasah tidak lagi berkonotasi sebagai akademi, tetapi sekolah tingkat dasar sampai menengah.<sup>1</sup>

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan madrasah di Indonesia tidak bisa lepas dengan masuknya Islam di Indonesia. Fase Madrasah di Indonesia dapat dibagi kepada tiga fase. Fase pertama, sejak mulai tumbuhnya pendidikan Islam sejak awal masuknya Islam ke Indonesia sampai munculnya zaman pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia. Fase kedua, sejak masuknya ide-ide pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia, dan Fase ketiga, sejak diundangkannya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 2 Tahun 1989 dan dilanjutkan dengan UU No. 20 tahun 2003).<sup>2</sup>

Fase pertama adalah fase awal munculnya pendidikan informal, yang dipentingkan pada tahap awal yaitu pengenalan nilai-nilai Islami, selanjutnya baru muncul lembaga-lembaga pendidikan Islam yang diawali dengan munculnya masjid-masjid dan pesantren-pesantren. Ciri yang paling menonjol pada fase ini adalah: a) materi pelajaran terkonsentrasi kepada pengembangan dan pendalaman ilmu-ilmu agama, seperti tauhid, fiqh, tasawuf, akhlak, tafsir, hadits dan lain-lain yang sejenis dengan itu, pembelajarannya terkonsentrasi kepada pembahasan kitab-kitab klasik yang berbahasa Arab, b) metodenya *sorogan*, *wetonan*, dan *mudzakarab*, dan c) sistemnya nonklasikal yakni dengan memakai sistem *balaqah*. *Outputnya* akan menjadi ulama, kiyai, ustadz, guru agama, dan juga menduduki jabatan-jabatan penting keagamaan dari tingkat yang paling tinggi seperti mufti sampai ke tingkat pengurusan soal-soal yang berkenaan dengan *fardu kifayah* ketika seorang meninggal dunia, di masyarakat Jawa dikenal peristilahan *modin*.

Fase kedua adalah fase ketika masuknya ide-ide pembaharuan pemikiran Islam ke Indonesia. Sejak abad ke-19 M. telah muncul ide-ide pembaharuan pemikiran Islam ke seluruh dunia Islam, dimulai dari gerakan pembaharuan di Mesir, Turki, Saudi Arabia dan juga Indonesia. Inti dari gerakan pembaharuan itu adalah berupaya untuk mengadopsi pemikiran pendidikan modern yang berkembang di dunia Timur Tengah dikembangkan di Indonesia berupa madrasah.<sup>3</sup>

Pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia dalam bentuk madrasah, dilatarbelakangi oleh dua faktor penting: a) faktor intern, yakni kondisi masyarakat muslim Indonesia yang terjajah dan terbelakang dalam

---

<sup>1</sup> Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), p. 193.

<sup>2</sup> Haidar Putra Dauly, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Inter Pratama Ofset, 2004), p. 5.

<sup>3</sup> *Ibid.*, p. 6.

dunia pendidikan mendorong semangat beberapa orang pemuka-pemuka masyarakat Indonesia untuk memulai gerakan pembaharuan pendidikan Islam tersebut, b) faktor ekstern, yakni sekembalinya pelajar dan mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu agama ke Timur Tengah, dan setelah mereka kembali ke Indonesia mereka memulai gerakan-gerakan pembaharuan dalam bidang pendidikan.<sup>4</sup>

Di Indonesia, dengan kehadiran lembaga-lembaga pendidikan Barat dalam bentuk sekolah sekuler yang dikembangkan oleh penjajah munculkan gerakan pembaharuan akhir abad XIX. Respons atas tantangan ini lebih bersifat isolatif, di mana madrasah hanya mengkhususkan kepada pengajaran ilmu-ilmu keagamaan dan hampir tidak mengajarkan sama sekali mata pelajaran umum. Kehadiran madrasah pada awal abad XX dapat dikatakan sebagai perkembangan baru di mana pendidikan Islam mulai mengadopsi mata pelajaran non-keagamaan. Orr mengatakan dalam hasil penelitiannya bahwa pendirian madrasah dilatarbelakangi usaha mempertahankan budaya terhadap berbagai proses sekulerisasi.<sup>5</sup>

Husni Rahim mengatakan bahwa pertumbuhan madrasah tidak hanya atas dasar semangat pembaharuan di kalangan umat Islam, tetapi beralas tumpu pada dua faktor: a) pendidikan Islam (masjid dan pesantren) dianggap kurang sistematis dan kurang memberikan kemampuan pragmatis yang memadai, b) perkembangan sekolah-sekolah Belanda di kalangan masyarakat cenderung meluas dan membawa watak sekularisme, sehingga harus diimbangi dengan sistem pendidikan Islam madrasah yang memiliki Diniyah dan organisasi yang lebih teratur dan terencana. Jadi, pertumbuhan madrasah sekaligus menunjukkan adanya dua pola respons umat Islam yang lebih progresif, tidak semata-mata pasif terhadap politik pendidikan Belanda.<sup>6</sup>

Steenbrink mengatakan bahwa faktor-faktor yang mendorong munculnya pembaharuan pendidikan Islam, termasuk munculnya madrasah di Indonesia adalah: a) adanya perlawanan nasionalisme terhadap penguasa kolonial Belanda, b) adanya usaha-usaha dari umat Islam untuk memperkuat organisasinya dalam bidang pendidikan, dan c)

---

<sup>4</sup>Maksum, *Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos, 1999), p. 82.

<sup>5</sup>Kenneth MM Billah Orr dan Budi Lazarusli, *Education for This Life or For The Life Come: Observationns on The Javanese Village Madrasah*, (Indonesia: t.p., 1977), pp. 129-156.

<sup>6</sup>Husni Rahim, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 2005), pp. 15-16.

tidak puas dengan metode pendidikan tradisional di dalam mempelajari al-Qur'an dan studi agama.<sup>7</sup>

Fase ketiga adalah fase masuknya madrasah dalam sistem pendidikan nasional, di mana madrasah menjadi bagian pendidikan nasional, sehingga pemerintah ikut memperhatikan tumbuh kembangnya madrasah di Indonesia.

Madrasah Diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah).<sup>8</sup> Madrasah Diniyah yang di dalamnya termasuk Madrasah Aliyah Diniyah bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.<sup>9</sup> Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.<sup>10</sup>

Madrasah Aliyah Diniyah ini ada yang diselenggarakan di dalam pondok pesantren dan ada yang diselenggarakan di luar pondok pesantren. Lembaga pendidikan Islam yang dikenal dengan nama Madrasah Diniyah telah lama ada di Indonesia.<sup>11</sup> di masa pemerintahan Hindia Belanda, hampir di semua desa di Indonesia yang penduduknya mayoritas Islam terdapat madrasah diniyah dengan berbagai nama dan bentuk seperti: pengajian anak-anak, sekolah kitab, sekolah agama dan lain-lain.<sup>12</sup> penyelenggaraan madrasah diniyah biasanya mendapatkan bantuan dari raja/sultan/pemimpin daerah setempat.

Di Indonesia, Madrasah Aliyah Diniyah (Madrasah Diniyah Ulya) terus berkembang pesat seiring dengan peningkatan kebutuhan

---

<sup>7</sup>Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Waktu Modern* (Jakarta: LP3ES, 1986), pp. 46-47.

<sup>8</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Bab I, Pasal 1, Ayat (3).

<sup>9</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Bab II, Pasal 2, Ayat (2)

<sup>10</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Bab III, Pasal 8, Ayat (1, 2).

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah Pertumbuhan dan Perkembangannya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003), p. 22.

<sup>12</sup> *Ibid.*, pp. 22-23.

pendidikan agama oleh masyarakat. Pendirian madrasah diniyah di luar pondok pesantren ini dilatarbelakangi keinginan masyarakat menambah pendidikan agama di sekolah yang dianggap belum memadai. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya agama, terutama dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, telah mendorong munculnya tingkat kebutuhan keberagamaan yang semakin tinggi.

Orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah umum, banyak yang merasakan bahwa pendidikan agama di sekolah sangat sedikit dan kurang begitu mendalam. Berbagai upaya dilakukan untuk menambah pendidikan agama yang telah diperoleh di sekolah. Salah satunya adalah memasukkan anaknya ke Madrasah Aliyah Diniyah, akan tetapi juga ada orang tua yang memang menyekolahkan anaknya hanya ke Madrasah Aliyah Diniyah saja, agar kelak menjadi orang yang betul-betul menguasai dan mendalami agama.

Kebutuhan mendalami agama di satu sisi, dan di sisi lain tambahan pendidikan agama bagi anak yang sekolah umum, telah mendorong peningkatan jumlah Madrasah Aliyah Diniyah. Hal ini menunjukkan bahwa Madrasah Aliyah Diniyah semakin diminati dan dipilih masyarakat, baik untuk menambah pendidikan agama yang telah diperoleh di sekolah umum maupun untuk memperdalam dan memperluas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam bagi siswa yang hanya menempuh pendidikan pada Madrasah Aliyah Diniyah.

Upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas dan kesesuaian Madrasah Diniyah dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman terus dilakukan. Akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak lepas dari problem, maka problem tersebut harus dicari penyebab dan akibatnya sekaligus solusinya.

Di dalam rangka mencari penyebab problem (akar persolan) dan akibat yang terjadi pada Madrasah Aliyah Diniyah di Indonesia, maka perlu adanya sebuah penelitian yang hasilnya bisa menjadi kontribusi untuk semua pihak, baik oleh pemerintah, pengelola dan pelaksana pendidikan, masyarakat maupun pengguna lulusan. Oleh karena itu, yang menjadi fokus penelitian adalah problem apa saja yang terjadi pada Madrasah Aliyah Diniyah di Indonesia, apa akibat problem tersebut, dan bagaimana solusinya.



## B. Kajian Terdahulu dan Perspektif Teori

Penelitian tentang madrasah sudah pernah dilakukan oleh Maksum,<sup>13</sup> ia mengkaji tentang Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya, titik tekan penelitian tersebut pada perkembangan institusi madrasah, yaitu membicarakan tentang madrasah pada Islam klasik dan sejarah pertumbuhan madrasah di Indonesia secara umum, belum sampai detail. Sama halnya Husni Rahim tentang Anatomi Madrasah dalam Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan keagamaan, ia juga memfokuskan penjelasannya pada perkembangan institusi madrasah di Indonesia, seperti Madrasah Aliyah Negeri, Swasta, Keterampilan dan lain sebagainya.<sup>14</sup> Tulisan tersebut juga masih secara garis besar, bahkan kadang-kadang bersifat wacana.

Karel A. Steenbrink melakukan penelitian tentang Pesantren, Madrasah dan Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern. Penelitian tersebut lebih menekankan pada pesantren, sedangkan madrasah dan sekolah sifatnya hanya sepintas kilas.

Dari hasil penelitian yang ada, pada umumnya lebih memfokuskan pada perkembangan institusi sekolah atau madrasah secara garis besar dan sifatnya umum, belum spesifik, maka di sini peneliti lebih memfokuskan pada problematika Madrasah Aliyah Diniyah di Indonesia.

Kriteria problem pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut: 1) sistem pendidikan yang masih bermasalah, 2) kurangnya pengakuan terhadap mutu lulusan, 3) kualitas guru masih rendah dan salah pegang materi pelajaran, 4) inputnya rendah, 5) sarana dan prasarana kurang memadai, 6) kurangnya tanggungjawab oleh semua pihak (pemerintah, orang tua dan masyarakat), 7) kurangnya dana yang memadai dan atau memadai tetapi tidak lancar, 8) kurikulum yang digunakan tidak relevan dengan kebutuhan dan bebannya terlalu berat, 9) orientasi kurikulum tidak jelas, 10) lemahnya manajemen pendidikan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), pp. 51-112.

<sup>14</sup>Husni Rahim, *Anatomi Madrasah di Indonesia "Edukasi"*: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan keagamaan, Volume 2, Nomor 2, April-Juni 2004, p. 24.

<sup>15</sup>H.A.R. Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21*, (Magelang: Indonesia Tera, 1999), pp. 30-51, lihat Sudarwan Danim, *Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), pp. 6-8, lihat Sutjipto, *Pendidikan Guru: Masalah dan Strategi Pemecabannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), pp. 92-113, lihat Abdul Munir Mulkhani, *Dilema Madrasah di Antara Dua Dunia*, Kompas, Sabtu, 22 September 2001, lihat Syamsul Arif Rakhmadani, *Problematika Pendidikan di Indonesia*, [http://bz.blogfam.com/bzaktual/menyoal\\_problematika\\_pendidikan/](http://bz.blogfam.com/bzaktual/menyoal_problematika_pendidikan/) dan p. 10, 5, dan lihat Arif Rahman, "Mengkaji Ulang Ukuran Keberhasilan Pendidikan di Indonesia", dalam *Mengurai Benang Kusut*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

Handayani mengatakan bahwa kriteria problem pendidikan di Indonesia antara lain adalah: 1) kurangnya tenaga guru yang profesional, 2) kinerja dan kesejahteraan guru yang belum optimal, 3) proses pembelajaran yang konvensional, 4) keterbatasan anggaran pendidikan, 5) rendahnya mutu SDM pengelola pendidikan, 6) mutu lulusan dan *life skill* yang dihasilkan tidak sesuai kebutuhan, dan 7) pendidikan yang belum berbasis masyarakat dan lingkungan.<sup>16</sup>

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan keutuhan suatu masalah atau problem yang ada di Madrasah Aliyah. Dengan kata lain, pendekatan kualitatif ini memusatkan perhatian pada fenomena yang ada.<sup>17</sup> Fenomena yang dimaksud adalah problem-problem yang terjadi di Madrasah Aliyah Diniyah di Indonesia.

Pendekatan kualitatif ini dapat dipandang sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang terlibat dalam pendidikan yang dapat ditemui, diamati, atau diminta informasi, bahwa problem atau fenomena tersebut sebagai satu kesatuan yang masing-masing berdiri sendiri tetapi satu sama lain saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan menyeluruh. Dalam hal ini teori dasar yang dipakai adalah pendekatan fenomenologis yang berupaya memahami persoalan yang ada, baik dari pelaku maupun lembaga yang menimbulkan fenomena atau problem.<sup>18</sup>

Penelitian kualitatif lebih bersifat natural, deskriptif, induktif dan menemukan makna dari suatu fenomena. Naturalistik, berarti konteks kebulatan yang menyeluruh yang tidak akan dipahami dengan membuat isolasi atau eliminasi sehingga terlepas dari konteksnya. Deskriptif, berarti penelitian ini tujuan utamanya adalah menerangkan apa adanya atau apa yang sekarang ada. Induktif berarti dari fenomena satu tempat dan tempat yang lain lalu digeneralisasikan menjadi fenomena umum. Dengan sifat ini berarti bahwa gambaran-gambaran yang berkembang di Madrasah Aliyah

---

<sup>16</sup>Handayani, <http://ayok.wordpress.com/2007/06/18/problematika-sistem-pendidikan-indonesia-gagasan-based-syaria-education/Ahad>, 6 Januari 2007.

<sup>17</sup>Parsudi Suparlan, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah, Majalah Media edisi 14 tahun 1993), p. 19.

<sup>18</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), p. 3.

didasarkan atas kenyataan-kenyataan empiris sebagaimana dapat dipahami dari permasalahan yang telah dirumuskan.<sup>19</sup>

Penentuan informan dalam penelitian ini didasarkan pada kriteria yang disarankan oleh Deddy Mulyana,<sup>20</sup> Guba dan Lincoln,<sup>21</sup> William J. Fieldstead:<sup>22</sup> a) enkulturasi penuh, artinya subjek cukup lama atau paling tidak lebih tahu, sehingga memiliki pengetahuan khusus atau informasi atau dekat dengan situasi yang menjadi fokus penelitian, b) keterlibatan langsung, subjek yang masih aktif di lingkungan aktifitas yang menjadi sasaran penelitian, c) subjek yang masih mempunyai waktu untuk dimintai informasi oleh peneliti, d) subjek memiliki otoritas dan kapasitas memberikan informasi, e) subjek yang tidak mengemas informasi, tetapi memberikan informasi yang sebenarnya.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara adalah upaya mendapatkan keterangan secara lisan atau tertulis dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang yang diwawancarai. Metode ini bertujuan memperoleh informasi dari semua responden, tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri setiap responden.<sup>23</sup> Wawancara yang dipilih dalam penelitian ini adalah wawancara yang tak berstruktur. Wawancara tak berstruktur dilakukan karena lebih bersifat fleksibel dan tanpa kehilangan arah. Dalam wawancara ini responden mendapat kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan buah pikiran, pandangan dan perasaan tanpa diatur oleh peneliti.<sup>24</sup>

Untuk mendapatkan informasi, peneliti mewawancarai pengurus pondok secukupnya, lalu minta untuk menunjukkan siapa saja yang dapat memberikan informasi terkait dan mendalam yang saling melengkapi tentang data-data yang diperlukan, dengan teknik bola salju (*snowball sampling*). Teknik bola salju ini digunakan untuk mencari informasi terus

---

<sup>19</sup>Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), p. 148.

<sup>20</sup>Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), p. 182.

<sup>21</sup>E.G. Guba dan Lincoln, Y, *Effective Evaluation, Improving the Usefulness of Evaluation Results through Responsive and Naturalistic Approaches*, (San Fransisco: Jossey-Bass, Inc, 1981), p. 78.

<sup>22</sup>William J. Fieldstead (ed.), *Qualitative Methodology: Firsthand Involvement with the Social World*. Chicago: Markham, 1970), pp. 217-231.

<sup>23</sup>Norman K. Denzin, *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*, (New York: McCraw-Hill, 1978), p. 105.

<sup>24</sup>Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), p. 202, dan lihat Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), p. 196.

menerus dari informan yang satu ke yang lainnya, sehingga data yang diperoleh semakin lengkap, banyak dan mendalam. Dalam memilih informan, di samping sumber yang dianggap paling mengetahui masalah yang dikaji, juga cara memilihnya dikembangkan sesuai kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data ini akan berhenti wawancara karena data dianggap telah jenuh.<sup>25</sup> Artinya, peneliti tidak menemukan informasi baru tentang problem yang diteliti.

Observasi adalah pengamatan langsung di lapangan terhadap objek yang diteliti.<sup>26</sup> Pengamatan langsung ini dilakukan oleh peneliti ketika datang ke lokasi melihat aktifitas pembelajaran siswa di kelas.

Dokumentasi digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, tulisan, arsip atau dokumen.<sup>27</sup> Catatan dan tulisan tersebut berupa undang-undang sistem pendidikan nasional, peraturan pemerintah, Surat Keputusan Menteri, buku-buku pedoman, jurnal, data-data yang ada di internet maupun di catatan-catatan yang lain.

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif-eksploratif-analitis dan *content analysis*. Deskriptif-eksploratif-analitis, yaitu mendeskripsikan pandangan para pejabat, pimpinan dan guru Madrasah Aliyah apa adanya, lalu dianalisa. Sedangkan *content analysis*, yaitu menelaah dan menganalisa dokumen-dokumen yang ada,<sup>28</sup> baik itu berupa Undang-undang Pendidikan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, maupun buku-buku pedoman.

## **D. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Temuan Data**

Saat ini jumlah Madrasah Diniyah di seluruh Indonesia sebanyak 34.571 dengan jumlah siswa/santri pada jenjang madrasah diniyah *Ula* (Ibtidaiyah) sebanyak 3.095.719, *Wusta* (Tsanawiyah) sebanyak 258.069, dan *Ulya* (Aliyah) sebanyak 74.744 dan tidak jenjang 51.847. Untuk lebih jelasnya tentang data siswa/santri dapat dilihat tabel 1 sebagai berikut:

---

<sup>25</sup>Deddy Mulyana, *Metodologi*, p. 182.

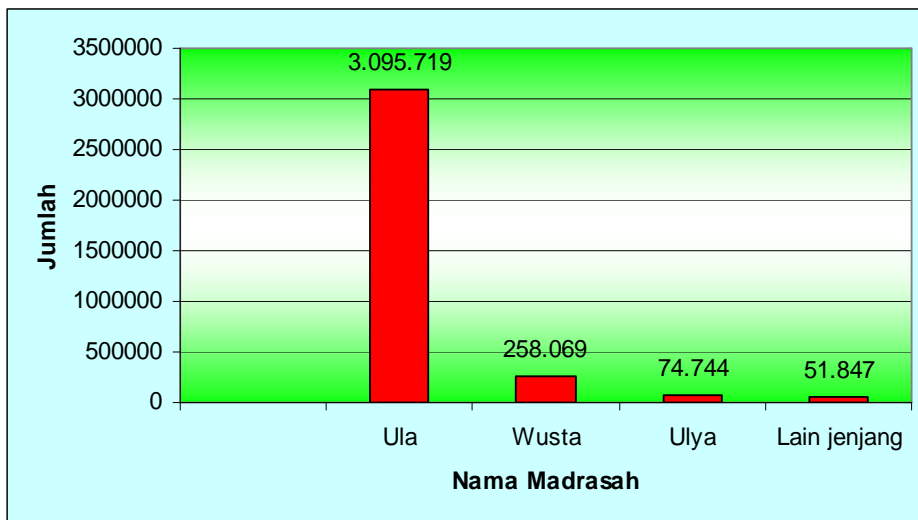
<sup>26</sup>Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), p. 1.

<sup>27</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), p. 56 dan lihat Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2002), p. 206.

<sup>28</sup>Abdullah Khozin Afandi dkk., *Buku Penunjang Berfikir Teoritis Marancang Proposal*, (Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, 2006), p. 154.

Tabel 1  
Jumlah Siswa Madrasah Diniyah di Indonesia Tahun 2005<sup>29</sup>

No	Nama Madrasah	Jumlah Siswa	Prosentase
1	Ula	3.095.719	89,0
2	Wusta	258.069	7,4
3	Ulya	74.744	2,1
4	Lain jenjang	51.847	1,5
	Total	3.480.379	100



Gambar 1  
Grafik Jumlah Siswa Madrasah Diniyah di Indonesia Tahun 2005

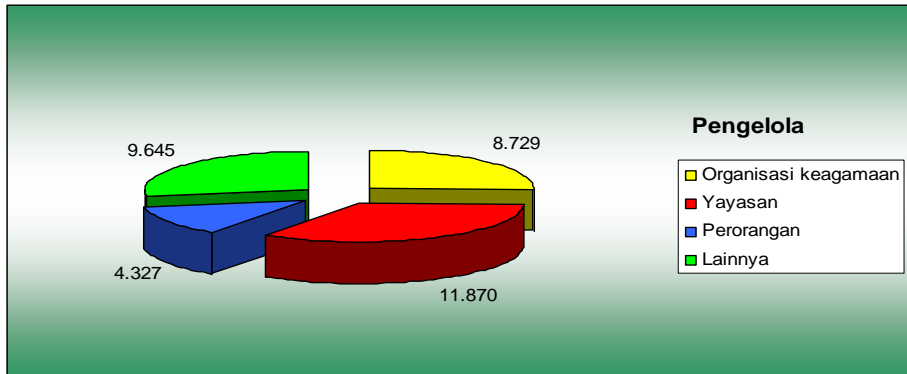
Dari sebanyak 34.571 jumlah Madrasah Diniyah di atas, yang dikelola oleh organisasi keagamaan sebanyak 8.729, Yayasan sebanyak 11.870, perorangan 4.327, dan lainnya sebanyak 9.645. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 2  
Jumlah Pengelola Madrasah Diniyah di Indonesia Tahun 2005<sup>30</sup>

No	Nama Pengelola	Jumlah	Prosentase
1	Organisasi keagamaan	8.729	25
2	Yayasan	11.870	34
3	Perorangan	4.327	13
4	Lainnya	9.645	28
	Total	34.571	100

<sup>29</sup><http://www.bagais.go.id/>, 36, Kamis, 3 Januari 2008.

<sup>30</sup><http://www.bagais.go.id/>, 33, Kamis, 3 Januari 2008

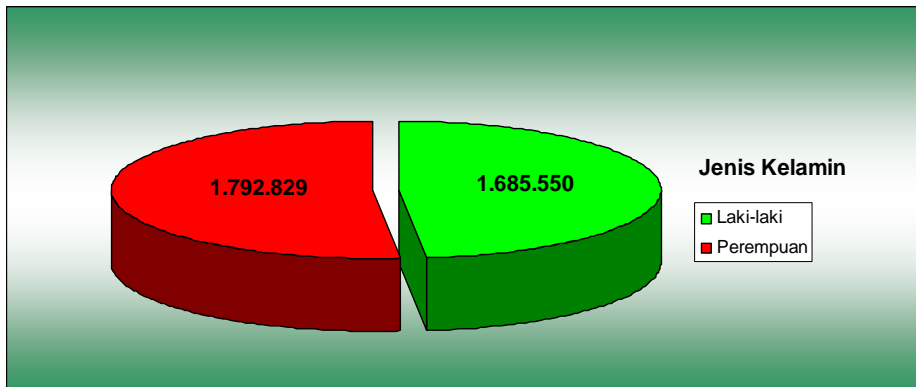


Gambar 2  
Perbandingan Jumlah Pengelola Diniyah di Indonesia Tahun 2005

Dari 34.571 jumlah Madrasah Diniyah di atas, terdapat 3.478.379 siswa/santri, putra sebanyak 1.685.550 dan perempuan sebanyak 1.792.829. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 3  
Jumlah Siswa Madrasah Diniyah di Indonesia Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2005<sup>31</sup>

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
	Putra	1.685.550	48,46
	Perempuan	1.792.829	51,54
	Total	3.478.379	100



Gambar 3  
Perbandingan Siswa Madrasah Diniyah di Indonesia Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2005

Madrasah Aliyah Diniyah menyebar di seluruh Indonesia, yang tidak kecil jumlahnya, tumbuh dan berkembang seperti tumbuh dan

<sup>31</sup><http://www.bagais.go.id/>, 35, Kamis, 3 Januari 2008.

berkembangnya masyarakat Muslim Indonesia. Ia tumbuh dan berkembang dengan karakteristiknya masing-masing. Seakan-akan tidak ada panduan dan aturan khusus dari pemerintah pusat, sehingga berjalan dengan otoritas dan kesesuaian institusi masing-masing. Kondisi yang demikian bukan berarti mulus dan lancar tanpa adanya problem. Problem tersebut antara lain adalah:

a. Problem ijazah dan akibatnya

Kurangnya perhatian pemerintah terhadap Madrasah Aliyah Diniyah tampak dalam ketidakjelasan kedudukan dan pengakuan terhadap lulusan pendidikan keagamaan, selama ini. Baru saja diakui oleh pemerintah setelah munculnya PP. Nomor 55 tahun 2007, itupun dengan persyaratan dan standar tertentu, bukan setiap Madrasah Aliyah Diniyah diakui. Sebab siswa yang telah tamat dari Madrasah Aliyah Diniyah memiliki *civil efect* sebagaimana tamatan madrasah formal, padahal dari segi kualitas penguasaan ilmu yang dipelajari, lulusan Madrasah Aliyah Diniyah tidak kalah dengan siswa yang mengikuti pendidikan di Madrasah Aliyah yang lain, tetapi ijazahnya ketika digunakan sebagai persyaratan administrasi menjadi persoalan sah dan tidaknya.

Hal ini ditegaskan oleh Qowimuddin<sup>32</sup> bahwa lulusan Madrasah Aliyah Al-Islah Bandar Kidul ketika mencalonkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malang diprotes oleh KPU setempat karena legalitas ijazah, akibatnya ia ditolak untuk mendaftar ke DPRD. Setelah itu, Qowimuddin datang ke Malang untuk mengklarifikasi, tetapi gagal. Berbeda dengan kasus yang ada di Salatiga, mendaftar Kepala Desa diprotes panitia, akibatnya tidak boleh mendaftar Kepala Desa, kemudian orangnya datang ke Kediri, dan Ijazahnya dimintakan legalisir ke Depag, akhirnya boleh mendaftar.

Lebih lanjut Makmun Baidhowi<sup>33</sup> mengatakan lulusan Madrasah Aliyah Diniyah Jampes ketika pulang banyak menjadi tokoh masyarakat dan juga banyak yang diminta menjadi penghulu (modin) karena kemampuannya di bidang agama, akan tetapi pada saat ditanyakan ijazahnya lalu ditunjukkan, pemerintah setempat tidak mengakui, akibatnya ditolak kemudian komplain ke pondok. Setelah itu alumni tersebut dimintakan rekomendasi ke Depag tetapi dipersulit dengan alasan materi pelajaran yang ada pada ijazah semua pelajaran agama, kecuali kalau ditambah pelajaran PMP, Bahasa Indonesia dan SKI, akhirnya dengan

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan pengurus dan Ustadz Madrasah Aliyah Dininah Al-Badriyah Pondok Pesantren Al-Islah Bandar Kidul Kota Kediri, tanggal 9 April 2008.

<sup>33</sup> Wawancara dengan Pengurus Pondok Pesantren Ihsan Jampes Kediri, tanggal 10 April 2008.

terpaksa ditambah dengan pelajaran umum walaupun tidak pernah diajarkan.

Sedangkan Saiful Kholiq<sup>34</sup> memberikan komentar, Lirboyo memang sudah mendapat pengakuan penyetaraan dari Departemen Agama sejak tahun 2006 dan itu tidak berlaku surut, sehingga lulusan yang mendapat pengakuan hanya setelah 2006 ke belakang, padahal lulusan dari Madrasah Aliyah Diniyah Lirboyo sudah puluhan ribu siswa, akibatnya para siswa yang lulus dari pondok pesantren Lirboyo ini ketika ingin melanjutkan ke perguruan tinggi agama tidak semuanya menerima. Kalau ingin diterima di perguruan tinggi ikut ujian penyetaraan paket C. Berbeda dengan kasus di Madura awal 2006, ada lulusan yang ingin maju calon kepala desa, lalu ditolak. Setelah itu SK dari Departemen Agama di photo copy kemudian dibawa ke Madura untuk ditunjukkan, akhirnya diterima.

Masih menurut Saiful Kholiq dan juga Qowimuddin,<sup>35</sup> sekarang ini alhamdulillah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan sudah ada, tinggal kapan isi peraturan tersebut dijalankan secara konsisten, kita menunggu sosialisasi secara menyeluruh, tidak hanya bagian-bagian saja.

#### b. Problem pendanaan dan akibatnya

Hampir seluruh Madrasah Aliyah Diniyah di Indonesia berdiri di atas kakinya sendiri. Ini artinya berdiri di atas usaha masyarakat sendiri tanpa menunggu bantuan proyek dari pemerintah. Semua berjalan sesuai dengan rencana dan kesiapan masing-masing. Ini dilakukan tidak semua bisa lancar, terutama problem pendanaan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pembelajaran.

Hal ini dikatakan oleh Qowimuddin dan Mu'min Firmansyah<sup>36</sup> bahwa Madrasah Aliyah Diniyah Al-Badriyah Pondok Pesantren Al-Islah Bandar Kidul Kediri belum pernah menerima bantuan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, kalaulah ada itu bantuan dari Wali Murid. Akibatnya proses pembelajaran tanpa meja-kursi (duduk lesehan), kecuali hanya untuk meja-kursi guru.

Lebih lanjut Baidhowi<sup>37</sup> mengatakan bahwa Madrasah Aliyah Diniyah Jampes Kediri belum pernah mendapat sentuhan dana dari

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Pengurus Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, tanggal 11 April 2008.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Pengurus dan Ustadz Madrasah Aliyah Dininah Al-Badriyah Pondok Pesantren Al-Islah Bandar Kidul Kota Kediri, tanggal 13 April 2008.

<sup>36</sup> Wawancara dengan Pengurus dan Ustadz Madrasah Aliyah Dininah Al-Badriyah Pondok Pesantren Al-Islah Bandar Kidul Kota Kediri, tanggal 9 April 2008.

<sup>37</sup> Wawancara dengan Pengurus Pondok Pesantren Ihsan Jampes Kediri, tanggal 16 April 2008.



pemerintah, baik pusat maupun daerah, sedangkan kondisi sarana belajar sangat sederhana dan terbatas. Akibatnya belajar di tempat yang ada, berdesak-desakan, satu kursi panjang yang normalnya ditempati 4 siswa ditempati 5 sampai 6 siswa, bahkan kadang-kadang jendela digunakan untuk tempat duduk.

Saiful Kholiq<sup>38</sup> mengatakan Pondok Pesantren Lirboyo ini memang besar, tetapi belum pernah mendapat bantuan dana untuk sarana dan prasarana belajar dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Sesuai dengan data yang ada, jumlah siswa Madrasah Aliyah Diniyah saja ada 1550 siswa, dari sekitar 10.000 santri yang ada, sedangkan ketersediaan tempat belajar sebanyak 24 ruang kelas. Ini kalau dihitung per kelas rata-rata 65 siswa. Akibatnya standar normal apalagi ideal tidak terpenuhi, itupun tidak menggunakan meja-kursi dalam proses belajar-mengajar, kecuali untuk guru.

### c. Problem kompetensi dan kualifikasi guru serta akibatnya

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembelajaran adalah kualitas guru. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dikatakan bahwa guru Madrasah Aliyah memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial, disamping memiliki ijazah S1. Namun kenyataan yang ada, kebanyakan guru-guru Madrasah Aliyah Diniyah di Indonesia tidak demikian.

Hal ini dikatakan oleh Saiful Khaliq, "contoh kasus Pondok Pesantren Lirboyo". Dari jumlah 1550 siswa dibimbing oleh 40 guru, yang S1 satu orang, S2 dua orang dan sisanya tamatan Aliyah. Dilihat dari sisi ini belum memenuhi kualifikasi dan ditambah dengan istilah "guru *mustabiq*".<sup>39</sup> Akibatnya guru mengajar hanya garis besar saja.

Sama halnya kasus di Pondok Pesantren Al-Islah Bandar Kidul Kediri sebagaimana dikatakan Qowimuddin,<sup>40</sup> dari 7 guru Madrasah Aliyah Diniyah, yang S1 tiga orang dan sisanya tamatan Madrasah Aliyah dan pesantren. Akibatnya metode pengajaran yang digunakan hanya ceramah saja, kurang menguasai metode yang lain.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Pengurus Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, tanggal 11 April 2008

<sup>39</sup> Sebutan guru kelas, yaitu guru yang mengajar sekian pelajaran (antara 4–7 mata pelajaran) dan mengikuti kenaikan kelas siswanya sampai tamat. Kalau siswanya tamat Aliyah berarti gurunya tamat menjadi *mustabiq* Aliyah. Berbeda dengan *munawib*, kalau *munawib* disebut dengan guru fak mata pelajaran. Di Lirboyo anejanya yang menjadi *munawib* justru para seniornya (pengasuh), sedangkan yang *mustabiq* malah yang masih junior.

<sup>40</sup> Wawancara dengan Pengurus dan Ustadz Madrasah Aliyah Dininah Al-Badriyah Pondok Pesantren Al-Islah Bandar Kidul Kota Kediri, tanggal 13 April 2008.

Di Madrasah Aliyah Diniyah Jampes sebagaimana dikatakan Makmun Baidhowi,<sup>41</sup> jumlah murid sekitar 160 siswa yang dibina oleh guru sebanyak 36 orang. Dari jumlah guru tersebut yang S1 dua orang dan D2 tiga orang, sedangkan selebihnya guru tamatan Madrasah Aliyah Diniyah. Akibatnya guru ketika mengajar kebanyakan monoton dan banyak menggunakan metode ceramah saja.

### **E. Pembahasan**

Di dalam kenyataan selama ini, bahwa pertumbuhan dan perkembangan Madrasah Aliyah Diniyah (Madrasah Diniyah Ulya) berdasarkan keinginan, kemauan, dan kebutuhan masyarakat sendiri terhadap pendidikan agama, sehingga pendiriannya pun tidak minta izin kepada pemerintah, kurikulum yang digunakan pun juga tidak menggunakan kurikulum pemerintah dan guru-gurunya pun tidak menggunakan standar kualifikasi pemerintah, sehingga asal siap tempat untuk proses pembelajaran, maka di situlah didirikan sebuah institusi (lembaga) Madrasah Aliyah Diniyah (Madrasah Diniyah Ulya). Guru yang mengajar yang penting siap dan mampu menurut ukuran mereka. Sedangkan kurikulumnya tidak menggunakan silabus (GBPP).

Keberadaan Madrasah Aliyah Diniyah (Madrasah Diniyah Ulya) selama ini diakui oleh masyarakat, akan tetapi masalahnya adalah kurangnya pengakuan pemerintah terhadap lulusan dan ijazahnya. Arif Rahman berpendapat: titik lemah atau problem pendidikan yaitu kurangnya pengakuan terhadap lulusan.<sup>42</sup> Temuan data yang peneliti dapatkan dari Qowimuddin<sup>43</sup> bahwa lulusan Madrasah Aliyah Diniyah Al-Islah Bandar Kidul ketika mencalonkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malang diprotes oleh KPU setempat karena legalitas ijazah, akibatnya ia ditolak untuk mendaftar ke DPRD. Dari pendapat teori dan kenyataan problem para lulusan Madrasah Aliyah Diniyah (Madrasah Diniyah Ulya) perlu adanya solusi. Oleh karena solusi yang perlu dilakukan adalah pengakuan pemerintah terhadap ijazah produk atau lulusan dari Madrasah Aliyah Diniyah (Madrasah Diniyah Ulya) seperti sekolah dan madrasah yang lain, tentu menggunakan aturan dan standart yang jelas.

Di sini, sekalipun sudah ada upaya dari pemerintah dua tahun yang lalu (2006), terdapat dua Madrasah Aliyah Diniyah (Pondok Pesantren Lirboyo Kediri dan Sidogiri Pasuruan) sebagai tahap awal, namun itu tidak

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Pengurus Pondok Pesantren Ihsan Jampes Kediri, tanggal 10 April 2008.

<sup>42</sup> Arif Rahman, *Mengkaji Ulang*, pp. 199-200.

<sup>43</sup> Wawancara dengan Pengurus dan Ustadz Madrasah Aliyah Dininah Al-Badriyah Pondok Pesantren Al-Islah Bandar Kidul Kota Kediri, tanggal 9 April 2008.

berlaku surut, sehingga lulusan sebelum 2006 tidak diakui, padahal produknya sama dan kualitasnya sama, kenapa pengakuannya berbeda. Inilah problem diskriminasi pengakuan dari pemerintah. Sama-sama anaknya, yang muda diakui, kenapa kakak tuanya tidak diakui, padahal dari rahim yang sama, apa salahnya dan apa kekurangannya. Di sini solusi yang perlu dilakukan adalah pengakuan semua lulusan Madrasah Aliyah Diniyah (Madrasah Diniyah Ulya) seluruh Indonesia yang memenuhi kriteria dan standar tertentu, kemudian hindari diskriminasi pengakuan dari pemerintah.

Memang pemerintah sekarang secara legal formal melalui PP Nomor 55 Tahun 2007 sudah mengakui keberadaan Madrasah Aliyah Diniyah (Madrasah Diniyah Ulya) dengan syarat-syarat tertentu. Yang menjadi problem adalah kapan legal formal tersebut bisa direalisasikan dengan sepenuhnya dan sungguh-sungguh. Sebab, kalau ini direalisasikan akan sangat membantu para lulusan Madrasah Aliyah Diniyah yang jumlahnya ratusan ribu. Oleh karena itu maka butuh keseriusan dan dukungan dari semua pihak, terutama pemerintah pusat, agar tidak sebatas konsepsi, tetapi segera sampai ke realisasi.

Di sisi lain, masalah pendanaan ini juga menjadi problem. Tilaar berpendapat, bahwa termasuk problem pendidikan nasional yaitu sarana dan prasarana kurang memadai.<sup>44</sup> Lebih lanjut Arif Rahman mengatakan bahwa lemahnya *political will* pemerintah menempatkan anggaran pendidikan juga menjadi problem pendidikan.<sup>45</sup> Menurut temuan data dari beberapa Madrasah Aliyah Diniyah (Madrasah Diniyah Ulya) yang ada di pondok pesantren semua mengatakan tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah untuk pembangunan gedung atau sarana-prasarana belajar. Akibatnya belajar apa adanya, tidak menggunakan meja-kursi, dan satu kelas bisa mencapai 60-70 siswa. Dari pendapat teori dan kenyataan problem pendanaan Madrasah Aliyah Diniyah (Madrasah Diniyah Ulya) setelah dianalisa, maka perlu adanya solusi. Solusi yang perlu dilakukan menurut peneliti adalah pemerintah mau membantu kepada Madrasah Aliyah Diniyah (Madrasah Diniyah Ulya) seperti membantu kepada saudara-saudaranya yang lain (MA/MAK/SMA/SMK).

Kemudian mengenai kompetensi dan kualifikasi guru Madrasah Aliyah Diniyah (Madrasah Diniyah Ulya) juga menjadi problem. Menurut PP. No. 19 tahun 2005, guru minimal berpendidikan S1, sehingga ini menjadi problem tersendiri bagi guru Madrasah Diniyah. Tilaar berpendapat bahwa adanya kualitas guru masih rendah dan salah pegang

---

<sup>44</sup>H.A.R. Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi*, p. 30-51.

<sup>45</sup>Arif Rahman, "Mengkaji Ulang Ukuran Keberhasilan Pendidikan di Indonesia", dalam *Mengurai Benang Kusut*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), pp. 199-200.

materi pelajaran adalah termasuk problem pendidikan.<sup>46</sup> Pendapat tersebut didukung oleh Sudarwan Danim.<sup>47</sup> Temuan data informasi yang peneliti dapatkan bahwa para guru yang mengajar di Madrasah Aliyah Diniyah (Madrasah Diniyah Ulya) tidak sampai 10% yang memiliki ijazah S1, akibatnya guru mengajar kurang profesional, penguasaan materi kurang mendalam, begitu pula penguasaan metode dan strategi belajar mengajar, sehingga mengajarnya monoton.

Dari pendapat teori dan kenyataan problem guru di Madrasah Aliyah Diniyah (Madrasah Diniyah Ulya) setelah dianalisa, maka perlu adanya solusi. Solusi yang perlu dilakukan menurut peneliti adalah mengikuti pendidikan S1 yang didukung dengan bantuan pemerintah, mengikuti work shop kependidikan, seminar dan pelatihan-pelatihan tentang metodologi pengajaran, sehingga kualitas guru bisa ditingkatkan dan aturan formal minimal berpendidikan S1 bisa diwujudkan.

## F. Penutup

Problem Madrasah Aliyah Diniyah di Indonesia adalah sebagai berikut: 1) ijazahnya tidak mendapat pengakuan pemerintah, akibatnya ketika digunakan menjadi PNS atau legislatif ditolak. Solusinya Perlu adanya pengakuan dari pemerintah melalui PP dan hindari diskriminasi pengakuan, 2) tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah, akibatnya belajar menggunakan fasilitas apa adanya. Solusinya penyediaan fasilitas belajar yang dibantu oleh pemerintah, seperti halnya membantu ke SMA/MA/SMK/MAK, dan 3) rendahnya kompetensi dan kualitas guru, akibatnya mengajar kurang profesional, penguasaan materi kurang mendalam, begitu pula penguasaan metode dan strategi belajar mengajar, sehingga mengajarnya monoton. Solusinya diikutsertakan program S1, workshop dan pelatihan metodologi pengajaran.

Kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah, hendaknya PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, segera direalisasikan terutama yang berkaitan dengan bantuan penyelenggaraan pendidikan kepada Madrasah Diniyah di seluruh Indonesia.

---

<sup>46</sup>H.A.R. Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi*, pp. 30-51.

<sup>47</sup>Sudarwan Danim, *Agenda Pembaharuan*, pp. 6-8.

### Daftar Pustaka

- Abd al-A'la, *Al-Tarbiyyah al-Islamiyah fi al-Qarn al-Rabi' al-Hijri*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.
- Al-Abrashi, Muhammad Atiyah, *Al-Tarbiyyah Al-Islamiyyah wa Falsafatuba*. Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.
- Afandi, Abdullah Khozin, dkk., *Buku Penunjang Berfikir Teoritis Marancang Proposal*, Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, 2006.
- Arikunto, Suharmisi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Arikunto, Suharmisi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Asrohah, Hanun, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Danim, Sudarwan, *Agenda Pembabaruan Sistem Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Dauly, Haidar Putra, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, Jakarta: Inter Pratama Ofset, 2004.
- Denzin, Norman K., *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*, New York: McCraw-Hill, 1978.
- Departemen Agama RI, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah Pertumbuhan dan Perkembangannya*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003.
- Fieldstead, William J., ed. *Qualitative Methodology: Firsthand Involvement with the Social World*, Chicago: Markham, 1970.
- Guba E.G., dan Lincoln, Y, *Effective Evaluation, Improving the Usefulness of Evaluation Results through Responsive and Naturalistic Approaches*, San Fransisco: Jossey-Bass, Inc, 1981.
- Handayani, <http://ayok.wordpress.com/2007/06/18/problematika-sistem-pendidikan-indonesia-gagasan-based-syaria-education/Ahad>, 6 Januari 2007.
- <http://www.bagais.go.id/>, 35, Kamis, 3 Januari 2008.
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.

- Ma'ruf, Naji, *Ulama Al-Nizhamiyah wa Madaris Al-Masyriq Al-Islami*, Baghdad: Mathba'at Al-Irsyad, 1393/1973.
- Ma'ruf, Naji, *Madaris Qabl Al-Nizhamiyah*, Baghdad: Mathba'at Al-Jam' Al-Ilm Al-'Iraqi, 1393/1973.
- Maksum, *Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Logos, 1999.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002.
- Mulkhan, Abdul Munir, "Dilema Madrasah di Antara Dua Dunia", *Kompas*, Sabtu, 22 September 2001.
- Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*, Bandung: Remaja Posdakarya, 2001.
- Mursi, Munir, *Al-Tarbiyah Al-Islamiyah: Ushuluba wa Tathowwuruba fi Al-Bilad Al-Arabiyah*. Kairo: Alam Al-Kutub, 1977.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999
- An-Nahlawi, Abdurrahman, *Usul At-Tarbiyah al-Islamiyah wa Asalibuba*. Damsyik: Dar al-Fikr, 1409.
- Orr, Kenneth MM Billah, dan Budi Lazarusli, *Education for This Life or For The Life Come: Observationns on The Javanese Village Madrasa*, Indonesia: t.p., 1977.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
- Rahim, Husni, *Anatomi Madrasah di Indonesia "Edukasi"*: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan keagamaan, Volume 2, Nomor 2, April-Juni 2004.
- Rahim, Husni, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Logos, 2005.
- Rahman, Arif, "Mengkaji Ulang Ukuran Keberhasilan Pendidikan di Indonesia", dalam *Mengurai Benang Kusut*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

- Rakhmadani, Syamsul Arif, *Problematika Pendidikan di Indonesia*, [http://bz.blogfam.com/bzaktual/menyoal\\_problematika\\_pendidika/](http://bz.blogfam.com/bzaktual/menyoal_problematika_pendidika/)
- Shaleh, Abdul Rahman, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Steenbrink, Karel A., *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Waktu Modern*, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Suparlan, Parsudi, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Semarang: Fakultas Tarbiyah, Majalah Media edisi 14 tahun 1993.
- Sutjipto, *Pendidikan Guru: Masalah dan Strategi Pemecahannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Tilaar, H.A.R., *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21*, Magelang: Indonesia Tera, 1999.
- Tritton, A.S., *Materials on Muslim Education in the Middle Ages*, London: Luzac, 1957.
- Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Mutiara, 1979.